



SALINAN

WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR : 100.3/291/Tahun 2026
TENTANG

PENETAPAN RENCANA PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA DAERAH
KOTA MAKASSAR TAHUN 2026

WALI KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Makassar tentang Penetapan Rencana Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah Kota Makassar Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 134 Tahun 2024 tentang Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7071);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

6. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2020 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR TENTANG PENETAPAN RENCANA PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Rencana Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah Kota Makassar Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan berdasarkan usulan Perangkat Daerah/Unit Kerja untuk ditindaklanjuti bersama pada Tahun 2026.
- KETIGA : Dalam hal tertentu yang dipandang perlu dan mendesak untuk kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat mengajukan Rancangan Peraturan Kepala Daerah meskipun tidak termasuk dalam agenda Rencana Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan pelaksanaannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pengusul atau instansi terkait langsung secara substansi mengagendakan Rencana Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah tersebut, untuk segera mempersiapkan pembahasan Rancangan Peraturan Kepala Daerah dengan melakukan koordinasi pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Makassar, dengan melibatkan Tenaga Ahli/Unsur terkait lainnya yang dipandang perlu, dan memperhatikan tahapan/mekanismenya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal, 19 jan 2026

WALI KOTA MAKASSAR,

Ttd

MUNAFRI ARIFUDDIN



Tembusan:

1. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Para Kepala Perangkat Daerah Kota Makassar;
3. Para Kepala Bagian Sekretariat Daerah Kota Makassar.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR
 NOMOR : 100.3/291/Tahun 2026
 TENTANG PENETAPAN RENCANA PROGRAM
 PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA DAERAH KOTA
 MAKASSAR TAHUN 2026

RENCANA PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA DAERAH
 KOTA MAKASSAR TAHUN 2026

NO.	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS	PELAKSANA	UNIT/INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
			BARU/UBAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA MAKASSAR							
1.	Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Makassar Tahun 2027		Baru	2026	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar	2026	
2.	Penetapan Renja-PD Tahun 2027		Baru	2026	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar	2026	
3.	Perubahan atas Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 15 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026		Ubah	2026	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar	2026	

NO.	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS	PELAKSANA	UNIT/INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
			BARU/UBAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4.	Penetapan Perubahan Renja PD Tahun 2026		Ubah	2026	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar	2026	
5.	Percepatan, Pencegahan, Penurunan Stunting Tahun 2025-2029		Baru	2026	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar	2026	
6.	Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Daerah Tahun 2025- 2029		Baru	2026	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar	2026	
7.	Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Kota Makassar Tahun 2025-2029		Baru	2026	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar	2026	
8.	Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kota Makassar Tahun 2025-2029		Baru	2026	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar	2026	

NO.	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS	PELAKSANA	UNIT/INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
			BARU/UBAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
9.	Rencana Aksi Daerah (RAD) Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah Kota Makassar Tahun 2025-2029		Baru	2026	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar	2026	
10.	Perubahan atas Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 61 Tahun 2019 tentang Pemberian Penghargaan Kepada Masyarakat		Ubah	2026	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar	2026	
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MAKASSAR							
1.	Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2027		Baru	2026	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar	2026	

NO.	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS	PELAKSANA	UNIT/INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
			BARU/UBAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.	Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2026		Baru	2026	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar	2026	
3.	Tata Cara Pemberian dan Pertanggung Jawaban Subsidi		Baru	2026	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar	2026	
4.	Perubahan atas Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah		Ubah	2026	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar	2026	
5.	Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025		Baru	2026	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar	2026	

NO.	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS	PELAKSANA	UNIT/INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
			BARU/UBAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
6.	Pemberian tunjangan hari raya dan gaji 13 yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2026		Baru	2026	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar	2026	
7.	Inventarisasi Barang Milik Daerah		Baru	2026	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar	2026	
8.	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2025		Baru	2026	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar	2026	
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA MAKASSAR							
1.	Nama Pengenal Usaha atau Profesi yang Dikecualikan dari Objek Pajak Reklame		Baru	2026	Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar	2026	

NO.	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS	PELAKSANA	UNIT/INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
			BARU/UBAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.	Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Usaha atas Pemanfaatan Aset Daerah pada Tanah dan/ atau Bangunan yang Dikuasai Pemerintah Daerah untuk Pemasangan Reklame serta Bangunan Reklame		Baru	2026	Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar	2026	
3.	Pemberian Kemudahan Perpajakan Daerah		Baru	2026	Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar	2026	
4.	Tata Cara Pemungutan PBJT atas Makanan dan/atau Minuman berupa Jasa Catering/Jasa Boga dan Sejenisnya dari Kegiatan Pembelian/Pengadaan Makan dan Minum yang Menggunakan APBD		Baru	2026	Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar	2026	

NO.	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS	PELAKSANA	UNIT/INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
			BARU/UBAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5.	Besaran Nilai Perolehan Air Tanah		Baru	2026	Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar	2026	
6.	Perubahan atas Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 61 Tahun 2024 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah		Ubah	2026	Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar	2026	
7.	Perubahan atas Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 60 Tahun 2024 tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah Bangunan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Daerah		Ubah	2026	Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar	2026	

NO.	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS	PELAKSANA	UNIT/INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
			BARU/UBAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
8.	Pemberian Insentif Fiskal kepada Pelaku Usaha Pajak Barang Jasa Tertentu atas Jasa Makanan/Minuman, Jasa Perhotelan, Jasa Parkir, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah dan Pajak Sarang Burung Walet		Baru	2026	Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar	2026	
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH							
1.	Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah Tahun 2025-2029		Baru	2026	Badan Riset dan Inovasi Daerah	2026	
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KOTA MAKASSAR							
1.	Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 11 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Daerah		Ubah	2026	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar	2026	

NO.	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS	PELAKSANA	UNIT/INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
			BARU/UBAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.	Pencabutan Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 32 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Tenaga Pendukung Non Aparatur Sipil Negara sebagai Laskar Pelayan Publik yang Berintegritas pada Lingkup Pemerintah Daerah		Pencabutan	2026	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar	2026	
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MAKASSAR							
1.	Pedoman Penyelenggaraan Penanganan Pengaduan Masyarakat Melalui Makassar <i>Super Apps Lontara+</i>		Baru	2026	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar	2026	

NO.	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS	PELAKSANA	UNIT/INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
			BARU/UBAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.	Penyelenggaraan Infrastruktur Telekomunikasi Saluran Serat Optik Bersama Bawah Tanah		Baru	2026	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar	2026	
3.	Penyelenggaraan Infrastruktur Sarana Jaringan Terpadu		Baru	2026	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar	2026	
4.	Sistem Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		Baru	2026	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar	2026	
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA MAKASSAR							
1.	Pembinaan Kerukunan dan Keharmonisan Kehidupan Bermasyarakat di Kota Makassar Tahun 2026		Baru	2026	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar	2026	

NO.	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS	PELAKSANA	UNIT/INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
			BARU/UBAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
INSPEKTORAT DAERAH KOTA MAKASSAR							
1.	Pedoman Pengelolaan Risiko		Baru	2026	Inspektorat Daerah Kota Makassar	2026	
2.	Pedoman Penyelesaian Temuan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah yang Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Baru	2026	Inspektorat Daerah Kota Makassar	2026	
DINAS PENDIDIKAN KOTA MAKASSAR							
1.	Pemberian Insentif Tunjangan Pulau bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan ASN dan Non ASN pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Daerah		Baru	2026	Dinas Pendidikan Kota Makassar	2026	
			STATUS	PELAKSANA	UNIT/INSTANSI TERKAIT		

NO.	TENTANG	MATERI POKOK	BARU/UBAH			TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
DINAS KESEHATAN KOTA MAKASSAR							
1.	Pemberian Tunjangan Khusus kepada Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan dan Penunjang di Pulau Wilayah Kota Makassar		Baru	2026	Dinas Kesehatan Kota Makassar	2026	
2.	Tarif Layanan Kesehatan dan Pendidikan pada Pusat Kesehatan Masyarakat Badan Layanan Umum Daerah pada Dinas Kesehatan		Baru	2026	Dinas Kesehatan Kota Makassar	2026	
3.	Pelayanan Kunjungan Rumah 24 Jam/ <i>Homecare</i> dan <i>Telemedicine</i> di Kota Makassar		Baru	2026	Dinas Kesehatan Kota Makassar	2026	

NO.	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS	PELAKSANA	UNIT/INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
			BARU/UBAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4.	Pengelolaan SDM pada Pusat Kesehatan Masyarakat Badan Layanan Umum Daerah pada Dinas Kesehatan		Baru	2026	Dinas Kesehatan Kota Makassar	2026	
5.	Penetapan Status Puskesmas		Baru	2026	Dinas Kesehatan Kota Makassar	2026	
DINAS PENATAAN RUANG KOTA MAKASSAR							
1.	Rencana Detail Tata Ruang Kota Makassar		Baru	2026	Dinas Penataan Ruang Kota Makassar	2026	
2.	<i>Masterplan</i> Ruang Terbuka Hijau Kota Makassar		Baru	2026	Dinas Penataan Ruang Kota Makassar	2026	
3.	Insentif dan Disinsentif		Baru	2026	Dinas Penataan Ruang Kota Makassar	2026	

NO.	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS	PELAKSANA	UNIT/INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
			BARU/UBAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA MAKASSAR							
1.	Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa Milik Pemerintah Kota Makassar		Baru	2026	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar	2026	
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MAKASSAR							
1.	Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat		Baru	2026	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar	2026	
DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA MAKASSAR							
1.	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan		Baru	2026	Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar	2026	
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAKASSAR							
1.	Rencana Induk Pengelolaan Sampah		Baru	2026	Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar	2026	

NO.	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS	PELAKSANA	UNIT/INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
			BARU/UBAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.	Pengelolaan Sampah dengan Fasilitas Tempat Pengolahan Sampah dengan Prinsip Mengurangi, Menggunakan Kembali, Mendaur Ulang		Baru	2026	Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar	2026	
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA MAKASSAR							
1.	Penataan Kader Institusi Masyarakat Perkotaan Bangga Kencana dan Sub Institusi Masyarakat Perkotaan Bangga Kencana		Baru	2026	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar	2026	
2.	Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Kota Makassar Tahun 2025-2029		Baru	2026	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar	2026	

NO.	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS	PELAKSANA	UNIT/INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
			BARU/UBAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						KOTA MAKASSAR	
1.	Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha dan Pelayanan Nonperizinan di Daerah		Baru	2026	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar		
2.	Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi		Baru	2026	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar		
DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN KOTA MAKASSAR							
1.	Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kota Makassar		Baru	2026	Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar		

NO.	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS	PELAKSANA	UNIT/INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
			BARU/UBAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.	Pedoman Pelaksanaan program Prioritas <i>Urban Farming</i>		Baru	2026	Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar		
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA MAKASSAR							
1.	Perubahan atas Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 17 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol		Ubah	2026	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar	2026	
2.	Perubahan atas Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pasar Murah dan Operasi Pasar		Ubah	2026	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar	2026	

NO.	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS	PELAKSANA	UNIT/INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
			BARU/UBAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
DINAS PERHUBUNGAN KOTA MAKASSAR							
1.	Penyesuaian Tarif Angkutan Umum Jenis Angkutan Kota Dalam Wilayah Kota Makassar		Baru	2026	Dinas Perhubungan Kota Makassar	2026	
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA MAKASSAR							
1.	Perubahan atas Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 46 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyaluran Anggaran Bantuan Hukum		Ubah	2026	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Makassar	2026	
BAGIAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEKRETARIAT DAERAH KOTA MAKASSAR							
1.	Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 82 Tahun 2022 tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Kelurahan		Ubah	2026	Bagian Pemberdayaan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Makassar	2026	

NO.	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS	PELAKSANA	UNIT/INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
			BARU/UBAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA MAKASSAR							
1.	Pencabutan Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 100 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kota Makassar Tahun 2023-2027		Pencabutan	2026	Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Makassar	2026	

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Makassar



Dr. Asrul Mimina, SH., MH.

WALI KOTA MAKASSAR,

Ttd

MUNAFRI ARIFUDDIN